

# **LAPORAN KEUANGAN BA 018**

**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024**

**BPSIP YOGYAKARTA**  
**018.09.0400.633975.KD**



**AUDITED**



**Jl. Stadion Maguwoharjo, No. 22, Karangsari, Wedomartani,  
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta**  
**Telpon : (0274) 884662, 566823, 514959**  
**Fax : (0274) 4477052**  
**Website : [www.yogya.litbang.pertanian.go.id](http://www.yogya.litbang.pertanian.go.id)**  
**E-MAIL : [BPSIPyogya@yahoo.com](mailto:BPSIPyogya@yahoo.com), [BPSIP-diy@litbang.pertanin.go.id](mailto:BPSIP-diy@litbang.pertanin.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP YOGYAKARTA adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP YOGYAKARTA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP YOGYAKARTA. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 9 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si  
NIP. 197109271998031002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Lain-lain

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2. Beban Pegawai
  - D.3. Beban Persediaan
  - D.4. Beban Barang dan Jasa
  - D.5. Beban Pemeliharaan
  - D.6. Beban Perjalanan Dinas
  - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
  - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Audited BPSIP YOGYAKARTA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 9 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Soeharsond, S.Pt, M.Si  
NIP. 197109271998031002



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP YOGYAKARTA Tahun 2024 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp459.091.588,00 atau mencapai 417 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 110.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.11.343.462.040,00 atau mencapai 96,62 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.11.740.564,000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 audited dicatat dan disajikan sebesar Rp.142.207.633.017,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 165,032,300,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 141,932,760,277,00; Properti Investasi (netto Rp109,840,440,00 , Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.69,176,901,00 dan Rp142,138,456,116,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 348,880,218,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12,377,436,475,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai (Rp12,028,556,257,00). Kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp468.671.390,00 dan Defisit (Rp11.559.884.867,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp11.559.884.867,00.

#### **IV. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 142.806.115.531,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp11,559,884,867,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 7,855,000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.10,884,370,452,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 142,138,456,116,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Audited disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BPSIP YOGYAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	110.000.000,00	459,091,588	417	352,747,094,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>110.000.000,00</b>	<b>459,091,588</b>	<b>317</b>	<b>325,747,094,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	5,839,917,000	5,834,356,339	100	4,891,285,641
Belanja Barang	B.4.	5,900,647,000	5,509,105,701	93	4,569,338,704
Belanja Modal	B.5.	0,00	,00	00	49,553,670
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>11,740,564,000</b>	<b>11,343,462,040</b>	<b>97</b>	<b>9,510,178,015</b>

**II. NERACA**

**BPSIP YOGYAKARTA**  
**NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR**  
**31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	75,143,000	0	75,143,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(370,700)	0	(370,700)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	73,769,300	0	73,769,300	0.00
Persediaan	90,260,000	61,205,000	29,055,000	47.47
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>165,032,300</b>	<b>61,205,000</b>	<b>103,827,300</b>	<b>169.64</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	124,586,131,002	124,586,131,002	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,175,403,837	14,175,403,837	0	0.00
Gedung dan Bangunan	20,692,764,859	20,810,872,859	(118,108,000)	(0.57)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	839,128,000	839,128,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	275,000,000	275,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(18,635,667,421)	(17,859,747,202)	(775,920,219)	4.34
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>141,932,760,277</b>	<b>142,826,788,496</b>	<b>(894,028,219)</b>	<b>(0.63)</b>
<b>Properti Investasi</b>				
Properti Investasi	118,108,000	0	118,108,000	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(8,267,560)	0	(8,267,560)	0.00
<b>JUMLAH Properti Investasi</b>	<b>109,840,440</b>	<b>0</b>	<b>109,840,440</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>142,207,633,277</b>	<b>142,887,993,496</b>	<b>(680,360,479)</b>	<b>(0.48)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	46,299,151	33,201,195	13,097,956	39.45
Pendapatan Diterima Dimuka	22,877,750	48,676,770	(25,799,020)	(53.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>69,176,901</b>	<b>81,877,965</b>	<b>(12,701,064)</b>	<b>(15.51)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>69,176,901</b>	<b>81,877,965</b>	<b>(12,701,064)</b>	<b>(15.51)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	142,138,456,116	142,806,115,531	(667,659,415)	(0.47)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>142,138,456,116</b>	<b>142,806,115,531</b>	<b>(667,659,415)</b>	<b>(0.47)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>142,138,456,116</b>	<b>142,806,115,531</b>	<b>(667,659,415)</b>	<b>(0.47)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>142,207,633,017</b>	<b>142,887,993,496</b>	<b>(680,360,479)</b>	<b>(0.48)</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### LAPORAN OPERASIONAL BPSIP YOGYAKARTA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	348,880,218	315,708,808	33,171,410	10.507
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	348,880,218	315,708,808	33,171,410	10.507
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	348,880,218	315,708,808	33,171,410	10.507
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0
Beban Pegawai	5,847,223,339	4,890,845,321	956,378,018	19.554
Beban Persediaan	43,631,750	281,880,375	(238,248,625)	(84.521)
Beban Barang dan Jasa	3,417,123,939	3,185,101,107	232,022,832	7.285
Beban Pemeliharaan	1,123,003,325	543,602,778	579,400,547	106.585
Beban Perjalanan Dinas	924,574,643	764,797,168	159,777,475	20.891
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	237,321,000	10,673,000	226,648,000	2,123.564

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	784,187,779	1,291,019,535	(506,831,756)	(39.258)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	370,700	0	370,700	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	12,377,436,475	10,967,919,284	1,410,520,191	12.86
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,028,556,257)	(10,652,210,476)	(1,376,345,781)	12.93
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(18,267,858)	18,267,858	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset	0	18,267,858	(18,267,858)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	468,671,390	209,023,556	259,647,834	124.219
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	468,671,390	209,023,556	259,647,834	124.219
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	468,671,390	190,755,698	277,915,692	145.692
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11,559,884,867)	(10,461,454,778)	(1,098,430,089)	10.509
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(11,559,884,867)	(10,461,454,778)	(1,098,430,089)	10.509

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BPSIP YOGYAKARTA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	142,806,115,531	145,190,058,295	(2,383,942,764)	(1.64)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11,559,884,867)	(10,461,454,778)	(1,098,420,089)	10.51
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	7,855,000	(1,079,918,907)	1,087,773,907	(100.73)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	7,855,000	0	7,855,000	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(1,079,918,907)	1,079,918,907	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,884,370,452	9,157,430,921	1,726,939,531	18.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(667,689,415)	(2,383,942,764)	1,715,280,349	(71.95)
EKUITAS AKHIR	142,138,456,116	142,806,115,531	(668,662,415)	(0.47)

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP YOGYAKARTA

BPSIP Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan untuk dapat menghasilkan inovasi teknologi pertanian, kelembagaan dan kebijakan pertanian spesifik lokasi yang diperlukan dalam membangun sector pertanian daerah yang tangguh dan berdaya saing.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2023 tentang Kementerian Pertanian.

BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Program Strategis BPSIP:

##### a. Agro Standar

Merupakan program strategis dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder bidang pertanian menghadapi era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

### **b. Pengujian Instrumen Pertanian**

BSIP melaksanakan program pengujian instrumen pertanian. Instrumen pertanian adalah: 1) alat dan mesin pertanian yang dipakai pada onfarm dan for farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin: pengelolaan, budi daya, panen, dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian termasuk alsin yang berbasis AI, IoT, dan Cyber Physical System); 2) sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); 3) unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; 4) dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan.

Ruang lingkup instrumen pertanian dikelompokkan menjadi:

1. Instrumen fisik: lahan pertanian, irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alsintan, pakan ternak, pembiayaan pertanian.
2. Instrumen biologi: varietas/galur tanaman dan ternak, benih/bibit tanaman dan ternak, mikroorganisme, DNA/RNA tanaman dan ternak.
3. Instrumen sistem: usaha tani integrasi tanaman-ternak/tanaman-tanaman/ternak-ternak, pascapanen pertanian, bioteknologi pertanian, perizinan pertanian, peningkatan kapasitas petani dan peternak.

Pengujian instrumen pertanian dilakukan melalui Balai Besar Pengujian, Balai Pengujian dan Loka Pengujian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

### **c. Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pertanian**

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melakukan penilaian kesesuaian melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu instrumen pertanian (barang, jasa, sistem, proses, dan personal) telah sesuai dengan Persyaratan Acuan.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Persyaratan Acuan merupakan dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal. Persyaratan Acuan ditetapkan dalam:

1. SNI yang ditetapkan oleh BSN;
2. SNI yang ditetapkan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI;

3. peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan persyaratan teknis, kualifikasi, dan kompetensi yang mengacu pada Standar lain atau ketentuan lainnya sebelum SNI ditetapkan;
4. peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan;
5. ketentuan yang termuat dalam keberterimaan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian secara timbal balik; dan/atau
6. Standar dan/atau Persyaratan Acuan lain yang diperlukan untuk kepentingan nasional.

#### **d. Penyediaan Benih Terstandar Dan Bersertifikat**

Merupakan salah satu program utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam menjamin mutu keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian melalui ketersediaan benih/bibit terstandar dan bersertifikat. BSIP memiliki sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam melaksanakan produksi benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung capaian produksi nasional.

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP YOGYAKARTA. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

BPSIP YOGYAKARTA menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP YOGYAKARTA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP YOGYAKARTA yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5) Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan  2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irrigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) **Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode tahun 2024 BPSIP YOGYAKARTA telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	110.000.000	110.000.000
Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,325,839,000	5,778,620,000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	61,245,000	61,297,000
Belanja Lembur	35,300,000	35,300,000
Belanja Barang Operasional	1,558,701,000	1,508,275,000
Belanja Barang Non Operasional	1,537,331,000	1,736,043,000
Belanja Barang Persediaan	49,422,000	48,601,000
Belanja Jasa	435,086,000	480,186,000
Belanja Pemeliharaan	925,214,000	1,123,042,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	461,780,000	1,004,500,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10,389,918,000</b>	<b>11,344,583,795</b>

## B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 348,664,890,00 atau mencapai 317 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 110.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	75,371,500	0
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	110.000,000	247,709,698	225.19
Pendapatan Lain-Lain	0	136,010,390	0
<b>Jumlah</b>	<b>110.000.000</b>	<b>459,091,588</b>	<b>417.36</b>

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 155,66 % dibandingkan TA 2023. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena pada tahun ini terdapat banyaknya setoran pengembalian kelebihan tunjangan fungsional peneliti, yang mana ada 5 orang yang telah melakukan pelunasan pada tahun 2024 ini. Serta kenaikan pada penjualan hasil pertanian serta pengembalian anggaran TAYL. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	75,371,500	34.404.000	66,81
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	247,709,698	196.330.050	-12,71
Pendapatan Jasa Lainnya	0		
Pendapatan Lain-Lain	136,010,390	740.556	16091,27
<b>Jumlah</b>	<b>459,091,588</b>	<b>280.612.106</b>	<b>24,25</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp11.343.462.040,00 atau 97 % dari anggaran belanja sebesar Rp11.740.564.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	5.839.917.000	5.834.356.339	99,92
Belanja Barang	5.900.647.000	5.509.105.701	93,96
Belanja Modal	0	0	0
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>11.740.564.000</b>	<b>11.344.583.795</b>	<b>96,67</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>1.121.755</b>	
<b>Total Belanja</b>	<b>11.740.564.000</b>	<b>11.343.462.040</b>	<b>96,63</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Kinerja Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 3 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Namun besarnya realisasi mengalami kenaikan hampir 1 miliar. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat pegawai yang mutasi ke BPSIP Yogyakarta sebanyak 22 pegawai di tahun 2024 ini baik PNS maupun P3K , sehingga belanja pegawainya bertambah cukup signifikan.
2. Tahun anggaran 2024 ini beberapa kegiatan teknis sudah mendapat alokasi anggaran dan kegiatan sudah berjalan. Untuk tahun lalu karena peralihan dari BPTP ke BSIP maka kegiatan yang dilaksanakan hanya Dukungan Manajemen dan sedikit kegiatan teknis.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Belanja Pegawai	5.834.356.339	4.891.285.641	19,28
Belanja Barang	5.509.105.701	4.569.338.704	20,56
Belanja Modal		49.553.670	-100,00
<b>Total Belanja</b>	<b>11.343.462.040</b>	<b>9.510.178.015</b>	<b>19,27</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,834,356,339,00 dan Rp4,891,285,641,00

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Secara nilai besaran Realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 19,28 % atau Rp943.070.698 dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena terdapat sebanyak 22 pegawai yang mutasi ke BPSIP Yogyakarta dan pada tahun 2024 ini ada tambahan pegawai PPPK. Secara kinerja anggaran prosentase realisasi tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1 % .

Perbandingan Belanja Pegawai  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.775.535.032	4.855.094.127	18,96
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	59.943.062	17.033.608	251,91
Belanja Lembur	0	21.566.000	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.835.478.094</b>	<b>4.893.693.735</b>	<b>19,24</b>

<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	1.121.755	2.408.094	-53,42
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.834.356.339</b>	<b>4.891.285.641</b>	<b>19,28</b>

Setelah Audit BPK Realisasi Belanja Pegawai tidak mengalami perubahan.

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.509.105.701,00 dan Rp4.569.338.704,00. Secara kinerja anggaran prosentase Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 7 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan adanya pemblokiran anggaran belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas, selain itu adanya pemblokiran perjalanan dinas sebesar 50 % di bulan desember 2024. Namun jika dilihat nilai besarnya realisasi belanja maka di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp939.766.997,00 hal ini disebabkan antara lain oleh karena pada tahun 2023 adalah masa peralihan BPTP ke BPSIP sehingga tahun kemarin kegiatannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini. Serta adanya tambahan anggaran untuk pemeliharaan Gedung dan bangunan dari secretariat BSIP.

Perbandingan Belanja Barang  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2024</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Barang Operasional	1,505,570,246	1,294,825,687	16,28
Belanja Barang Non Operasional	1,483,083,975	1,513,049,812	-1,98
Belanja Barang Persediaan	44,051,950	91,093,955	-51,64
Belanja Jasa	429,241,762	374,090,384	14,74
Belanja Pemeliharaan	1,122,583,125	531,481,698	111,22
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	924,574,643	764,797,168	20,89

Jumlah Belanja Kotor	5,509,105,701	4,569,338,704	20,57
Pengembalian Belanja Barang			
Jumlah Belanja	5,509,105,701	4,569,338,704	20,57

Setelah Audit BPK Realisasi Belanja Barang tidak mengalami perubahan.

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp49.553.670,00

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	49,553,670	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>49,553,670</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja Barang	0,00	,000	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>49,553,670</b>	<b>0</b>

## . PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian uang kas di Bendahara pengeluaran terdiri dari uang di brankas Rp. 0,00 dan uang di rekening Bank Rp. 0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang di Brankas	0	0
Uang di Rekening Bank	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

#### C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 74.140.000,00 dan Rp. 0,00. Setelah audit BPK terdapat penambahan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1.003.000,00 berupa kelebihan pembayaran tunjangan fungsional. Piutang tersebut sudah disetorkan ke kas negara dengan bukti **7245C0NA0DEQLPIP** tanggal 30 Januari 2025 .Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2024 audited dan 31 Desember 2023

Nama Debitur	Nilai Piutang	Keterangan
Dr. Rudi Hartono, S.P, M.P	26.280.000,00	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Reki Hendrata, SP	13.300.000,00	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Kurnianita T, S.Pi, M.A	12.300.000,00	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Agung Iswadi, S.Si, M.Sc	15.120.000,00	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Purwaningsih, S.TP	7.140.000,00	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Prasasti Wahyu H	1.003.000,00	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
<b>Jumlah</b>	<b>75.143.000,00</b>	

**C.1.4. Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 90.260.000,00 dan Rp. 61.205.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan ke Masyarakat	90.260.000,00	61.205.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>90.260.000,00</b>	<b>61.205.000,00</b>

Setelah audit BPK saldo Persediaan tidak mengalami perubahan.

Rincian saldo persediaan senilai Rp. 90.260.000,00 terdiri atas :

- 27 ekor domba senilai Rp56.940.000
- 251 ekor ayam KUB 1 senilai Rp11.295.000
- 185 ekor ayam KUB 2 senilai Rp8.325.000
- 5 kg Benih Padi Bioprime SS senilai Rp55.000
- 35 kg Jagung Pulut Uri 1 SS senilai Rp525.000
- 656 kg Jagung Jakarin 1 SS senilai Rp13.120.000

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp124.586.131.002,00 dan Rp124.586.131.002,00. Rincian Aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Kode Barang	L o k a s i	Luas m <sup>2</sup>	Nu p	Nilai (Rp.)	STATUS KEPEMILIKAN
						Sertifikat
1	2010101002	Jl. Moses Gatotkaca	704	1	7.726.280.000	SHP No. 00521 SU/00120 21/07/2014
2	2010104001	Jl. Rajawali No. 28 Mrican. Yogyakarta	1.868	4	19.097.358.000	SHP No. 101 SU/4255 Th. 1987
3	2010104001	Jl. Stadion No. 22 Maguwoharjo. Sleman.	23.108	5	69.282.406.000	SHP No. 8 SU/6192 Th.1996
4	2010104001	Jl. Stadion No. 22 Maguwoharjo. Sleman.	7.152	6	23.268.782.000	SHP No. 110 SU/0073 Th. 2013
5	2010203003	Jl. Wonolelo. Sitimulyo. Piyungan. Bantul. Yogyakarta	5.839	1	736.596.706	SHP No. 00062 09 Oktober 2017

6	2010203003	s d a	18.069	2	2.279.425.565	SHP No. 00060 09 Oktober 2017
7	2010203003	s d a	16.282	3	2.053.993.417	SHP No. 00059 09 Oktober 2017
8	2010203003	s d a	887	4	111.896.090	SHP No. 00063 09 Oktober 2017
9	2010203003	s d a	233	5	29.393.224	SHP No. 00061 09 Oktober 2017
<b>Jumlah Total</b>			<b>74.105</b>		<b>124.586.131.002</b>	

Setelah audit BPK saldo akun Tanah tidak mengalami perubahan

#### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.175.403.837,00 dan Rp. 14.175.403.837,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>14.175.403.837,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	0,00
<b>Mutasi kurang</b>	
Penghapusan	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>14.175.403.837,00</b>
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024	-13.961.337.364,00
<b>Nilai buku per 31 Desember 2024</b>	<b>214.066.473,00</b>

Setelah audit BPK saldo Peralatan dan Mesin tidak mengalami perubahan.

#### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.

20.692.764.859,00 dan Rp. 20.810.872.859,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>20.810.872.859,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Pencatatan	0
<b>Mutasi kurang</b>	
Reklasifikasi keluar	118.108.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>20.692.764.859,00</b>
Akumulasi penyusutan per <b>31 Desember 2024</b>	-4.407.854.570,00
<b>Nilai buku per 31 Desember 2024</b>	<b>16.284.910.289,00</b>

Mutasi kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp118.108.000 (Seratus delapan belas juta seratus delapan ribu rupiah) disebabkan karena dilakukan Reklasifikasi menjadi Properti Investasi.

Setelah audit BPK saldo Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 839.128.000,00 dan Rp. 839.128.000,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>839.128.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Pencatatan	0,00
<b>Mutasi kurang</b>	
Koreksi Pencatatan	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>839.128.000,00</b>
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024	- 249.696.366,00
<b>Nilai buku per 31 Desember 2024</b>	<b>589.431.634,00</b>

Setelah audit BPK saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami perubahan

### C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. -18.635.667.421,00 dan Rp.-17.859.747.202,00. Setelah audit BPK saldo Akumulasi Penyusutan tidak mengalami perubahan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	124.586.131.002,00	0,00	124.586.131.002,00
2.	Peralatan dan Mesin	14.175.403.837,00	13.961.337.364	214.066.473,00
3.	Gedung dan Bangunan	20.810.872.859,00	4.407.854.570	16.403.018.289,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	839.128.000	266.475.487	572.652.513,00
<b>Jumlah</b>		<b>160.411.535.698,00</b>	<b>18.635.667.421,00</b>	<b>141.932.760.277,00</b>

### C.2.6 Aset Tetap Lainnya

Nilai saldo Aset Tetap lainnya yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 275.000.000,00 dan Rp. 275.000.000,00. Setelah audit BPK saldo Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan. Aset ini berupa alat musik gamelan. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	275.000.000,00
<b>Mutasi Tambah</b>	
Hasil Inventarisasi	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>275.000.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>275.000.000,00</b>

#### C.2.7 Properti Investasi

Nilai saldo Properti Investasi yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 118.108.000,00 dan Rp. 0,00. Setelah audit BPK saldo Property Investasi tidak mengalami perubahan Saldo Properti Investasi berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja BPSIP YOGYAKARTA yang berlokasi di Jl. Moses Gatot Kaca Yogyakarta.

### C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

#### C.51. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.299.151,00 dan Rp. 33.201.195,00. Setelah audit BPK saldo utang kepada pihak ketiga tidak mengalami perubahan Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPSIP YOGYAKARTA per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	14.240.000,00	370.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	32.059.151,00	32.831.195,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.299.151,00</b>	<b>33.201.195,00</b>

Nilai utang kepada pihak ketiga senilai Rp. 46.299.151,00 terdiri atas :

1. Tunjangan fungsional pegawai (APSP) bulan November dan Desember tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp. 14.240.000,00
2. Beban langganan listrik bulan Desember yang belum dibayarkan sebesar Rp. 31.349.194,00
3. Beban langganan telepon bulan Desember yang belum dibayarkan sebesar Rp. 709.957,00

#### **C.5.2 Pendapatan diterima dimuka**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.877.750,00 dan Rp. 48.676.770,00. Setelah audit BPK saldo Pendapatan di terima dimuka tidak mengalami perubahan Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka.

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Sewa bangunan kantor lainnya	22.877.750,00	12.379.040,00
Jumlah	<b>22.877.750,00</b>	12.379.040,00

#### **C.5.3 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. EKUITAS

### C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan adalah masing-masing sebesar Rp. 142,137,453.116,00 dan Rp. 142.806.115.531,00. Setelah audit BPK saldo ekuitas mengalami perubahan menjadi Rp142.138.456.116,00. Perubahan ekuitas dikarenakan adanya penambahan pada akun piutang pajak. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 348.880.218,00 dan Rp. 315.708.808,00. Setelah audit BPK saldo PNBP tidak mengalami perubahan Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	27.450.000,00	40.700.000,00	-32,56
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	75.371.500,00	36.579.000,00	106,05
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	199.236.000,00	185.362.288,00	7,48
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	46.822.718,00	79.631.750,00	-41,20
<b>Jumlah</b>	<b>348.880.218,00</b>	<b>315.708.808,00</b>	<b>10,51</b>

Jumlah pendapatan jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan senilai Rp. 459.091.588,00 terdapat selisih sebesar Rp 110.211.370,00. Selisih ini merupakan:

1. Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu Rp. 136.010.390,00
2. Penyesuaian atas pendapatan sewa diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp. -25.799.020,00

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.848.226.339,00 dan Rp. 4.890.845.321,00. Setelah audit BPK saldo Beban Pegawai mengalami perubahan menjadi Rp. 5.847.223.339,00. Perubahan ini disebabkan karena selama audit BPK ditemukan adanya tunjangan fungsional yang belum dibayarkan pada tahun 2024 senilai Rp. 1.003.000,00. Namun kekurangan ini telah disetor ke kas

negara pada tanggal 30 Januari 2025. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Perbandingan Beban Pegawai  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.069.465.800,00	3.300.891.700,00	23,28
Beban Pembulatan Gaji PNS	58.890,00	46.125,00	27,67
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	290.111.260,00	237.802.220,00	22,00
Beban Tunj. Anak PNS	85.928.348,00	66.507.916,00	29,20
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	412.508.000,00	483.950.000,00	-14,56
Beban Tunj. PPh PNS	47.810.019,00	25.985.992,00	83,98
Beban Tunj. Beras PNS	209.148.960,00	179.456.760,00	16,55
Beban Uang Makan PNS	559.349.000,00	465.095.000,00	20,27
Beban Tunjangan Umum PNS	87.700.000,00	67.310.000,00	30,29
Beban Gaji Pokok PPPK	40.023.200,00	10.588.800,00	277,98
Beban Pembulatan Gaji PPPK	438,00	112,00	291,07
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.002.320,00	1.058.880,00	277,98
Beban Tunjangan Anak PPPK	800.464,00	211.776,00	277,98
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000,00	1.400.000,00	250,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	3.041.640,00	869.040,00	250,00
Beban Uang Makan PPPK	7.175.000,00	2.905.000,00	146,99
		21.566.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.847.223.339</b>	<b>4.890.845.321,00</b>	<b>19,57</b>

Jumlah beban pegawai jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 5.834.356.339,00 terdapat selisih sebesar Rp. 12.867.000,00.

Nilai ini merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp. 14.240.000,00, kelebihan tunjangan fungsional Rp. 1.003.000,00 dan jurnal balik akrual senilai Rp.- 370.000,00 .

#### **D.3. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.631.750,00 dan Rp. 281.880.375,00. Setelah audit BPK saldo Beban Persediaan tidak mengalami perubahan Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0	209.144.500,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	43.631.750,00	72.735.875,00	-40,01
<b>Jumlah</b>	<b>43.631.750,00</b>	<b>281.880.375,00</b>	<b>-84,52</b>

Jumlah realisasi belanja barang persediaan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 44.051.950,00. Nilai beban persediaan per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp. 420.200,00. Nilai ini merupakan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan.

#### **D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.417.123.939,00 dan Rp. 3.185.101.107,00. Setelah audit BPK saldo Beban Barang dan Jasa tidak mengalami perubahan Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.086.118.775,00	1.264.428.856,00	-14,10
Beban Barang Non Operasional Lainnya	381.565.200,00	249.990.000,00	52,63
Beban Barang Operasional lainnya	299.938.500,00	248.620.956,00	20,64
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93.367.200,00	126.168.000,00	-26,00
Beban Honor Output Kegiatan	15.400.000,00	0	
Beban Keperluan Perkantoran	1.112.264.546,00	918.667.687,00	21,07
Beban Langganan Listrik	365.022.451,00	340.258.263,00	7,28
Beban Langganan Telepon	13.009.767,00	12.167.345,00	6,92
Beban jasa profesi	11.600.000,00	10.000.000	18,00
Belanja Sewa	38.837.500,00	14.800.000	162,42
<b>Jumlah</b>	<b>3.417.123.939,00</b>	<b>3.185.101.107,00</b>	<b>7,29</b>

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.218.518.905,00. Beban persediaan per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp. 772.044,00 . Selisih ini terdiri atas :

1. Belanja Barang yang masih harus dibayar Rp. 32.059.151,00
2. Jurnal balik akrual listrik dan telepon tahun 2023 Rp. -32.831.195,00

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.123.003.325,00 dan Rp. 543.602.778,00. Setelah audit BPK saldo Beban Pemeliharaan tidak mengalami perubahan Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	750.458.475,00	275.119.133,00	172,78
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	372.124.650,00	256.362.565,00	45,16
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	420.200,00	12.121.080	-96,53
Beban Persediaan suku cadang			
<b>Jumlah</b>	<b>1.123.003.325,00</b>	<b>543.602.778,00</b>	<b>106,59</b>

Jumlah realisasi belanja pemeliharaan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.123.003.325,00. Nilai beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 924.574.643,00. Dan Rp. 764.797.168,00. Setelah audit BPK saldo Beban Perjalanan Dinas tidak mengalami perubahan. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	640.904.643,00	678.247.168,00	-5,51
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	283.670.000,00	86.550.000,00	227,75
<b>Jumlah</b>	<b>924.574.643,00</b>	<b>764.797.168,00</b>	<b>20,89</b>

#### **D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 237.321.000,00 dan Rp. 10.673.000,00. Setelah audit BPK saldo Beban Barang untuk diserahkan pada masyarakat tidak mengalami perubahan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat terdapat selisih senilai Rp. 237.321.000,00. Nilai ini merupakan penjualan ayam DOC, domba , benih padi dan benih jagung serta hasil opnam fisik ayam KUB.

#### **D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 784.187.779,00 dan Rp. 1.291.019.535,00. Setelah audit BPK saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tidak mengalami perubahan Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	541.432.370,00	275.119.133,00	96,80
Beban Penyusutan Irigasi	16.442.354,00	16.442.354,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.000.000,00	97.723.000,00	-83,63
Beban Penyusutan Jaringan	1.115.850,00	1.115.850,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	208.016.125,00	633.124.881,00	-67,14
Beban Penyusutan Properti Investasi	1.181.080,00		
<b>Jumlah</b>	<b>784.187.779,00</b>	<b>1.291.019.535,00</b>	<b>-39,26</b>

#### D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	252.573.500,00	207.523.000,00	21,71
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	198.010.172,00	740.556,00	26638,04
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	12.140.218,00	0	
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	5.947.500,00	760.000	682,57
<b>Jumlah</b>	<b>468.671.390,00</b>	<b>209.023.556,00</b>	<b>124,22</b>

Surplus / defisit dari kegiatan non operasional terdiri atas :

1. Pendapatan perolehan aset lainnya senilai Rp. 252.573.500,00 berasal dari :
  - Transaksi pencatatan 10 ekor domba senilai Rp7.837.500 sesuai Surat Keterangan No. : B-4172/PL.220/H.12.14/06/2024 tanggal 28 Juni 2024.
  - Transaksi pencatatan 10 ekor domba senilai Rp10.485.000 sesuai Surat Keterangan No. : B-9079/PL.220/H.12.14/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.
  - Transaksi pencatatan benih masuk UPBS Rp109.050.000.
  - Pencatatan 21.610 ekor ayam DOC senilai Rp125.201.000.
2. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 198.010.172,00
3. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 12.140.218,00,00
4. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan senilai Rp. 5.947.500,00

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 142.806.115.531,00 dan Rp. 145.190.058.295,00 .

### **E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. -11.560.887,867,00 dan Rp. 10.461.454.778,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.855.000,00 dan Rp -1.079.918.907,00.

#### **E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp. 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reclasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

### **E.4. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.884.370,452,00 dan Rp. 9.157.430.921,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Jenis Transaksi	Nilai per 31 Desember 2024
Ditaghikan ke Entitas Lain	11.343.462.040,00
Diterima dari Entitas Lain	- 459.091.588,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.884.370.452,00</b>

#### **E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditaghikan Ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditaghikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp. - 459.091.588,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. 11.343.462.040,00.

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 142.137.453.116,00 dan Rp. 142.806.115.531,00. Setelah audit BPK saldo Ekuitas Akhir mengalami perubahan menjadi Rp142.138.456.116,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **I. Entitas Pelapor**

- a. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat Jalan Stadion Maguwoharjo No. 22 Karangsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
- b. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala dengan kedudukan sebagai Eselon III. Selain Kepala yang menduduki jabatan eselon III, terdapat satu struktural eselon IV yaitu pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta sebagai UAKPA/B lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sesuai dengan Permentan No. 41/Permentan OT.140/9/2008 tanggal 4 September 2008, mendapat tugas tambahan yaitu menjadi sekretariat dan koordinator UAPPA/B-W.

#### **II. Catatan Penting Lainnya**

- a. Pagu awal BPSIP Yogyakarta berdasarkan DIPA TA 2024 dengan Nomor : SP DIPA- 018.09.2.633975/2024 terbit tanggal 24 November 2023 sebesar Rp10.389.918.000,00. Selama periode tahun 2024 BPSIP Yogyakarta telah mengalami 17 kali revisi pagu anggaran DIPA, perubahan revisi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :
  1. DIPA revisi ke-1 pada tanggal 05 Januari 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00 Revisi ini ada penambahan pagu sebesar Rp707.228.000,00 pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian di daerah istimewa Yogyakarta.
  2. DIPA revisi ke 2 pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Pagu sebesar Rp 11.097.146.000. revisi ini tidak merubah pagu anggaran.

3. DIPA Revisi ke 3 pada tanggal 31 januari 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
4. DIPA Revisi ke 4 pada tanggal 05 Maret 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
5. DIPA Revisi ke 5 pada tanggal 18 April 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
6. DIPA Revisi ke 6 pada tanggal 27 Mei 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
7. DIPA Revisi ke 7 pada tanggal 06 Juni 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
8. DIPA Revisi ke 8 pada tanggal 24 juni 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
9. DIPA Revisi ke 9 pada tanggal 15 Juli 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
10. DIPA Revisi ke 10 pada tanggal 24 juni 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
11. DIPA Revisi ke 11 pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan pagu sebesar Rp11.097.146.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
12. DIPA Revisi ke 12 pada tanggal 17 September 2024 dengan pagu sebesar Rp11.557.179.000,00. Revisi ini ada penambahan pagu sebesar Rp460.033.000,00 pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian di daerah istimewa Yogyakarta sebesar Rp67.500.000,00 dan belanja gaji pokok sebesar Rp392.533.000.
13. DIPA Revisi ke 13 pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan pagu sebesar Rp11.557.179.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
14. DIPA Revisi ke 14 pada tanggal 07 November 2024 dengan pagu sebesar Rp11.540.570.000,00. Revisi ini merubah Pagu anggaran karena adanya pengurangan PNPB tahun berjalan sebesar Rp16.639.000,00.
15. DIPA Revisi ke 15 pada tanggal 14 November 2024 dengan pagu sebesar Rp11.540.570.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.

16. DIPA Revisi ke 16 pada tanggal 18 November 2024 dengan pagu sebesar Rp11.540.570.000,00. Revisi ini tidak merubah pagu anggaran.
  17. DIPA Revisi ke 17 pada tanggal 28 November 2024 dengan pagu sebesar Rp11.740.564.000,00. Revisi merubah pagu anggaran dikarenakan adanya tambahan pagu sebesar Rp199.994.000 pada kegiatan pemeliharaan.
- b. Selama proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada satker BPSIP Yogyakarta ditemukan terdapat kelebihan pembayaran tunjangan fungsional petubel atas nama Pratiwi Wahyu H sebesar Rp. 1.003.000,00. Namun kelebihan ini telah disetor ke kas negara pada tanggal 30 Januari 2025 dengan nomor dokumen NTPN **7245C0NA0DEQLPIP**. Kelebihan tunjangan fungsional ini telah ditindaklanjuti oleh satker dengan melakukan input pada modul piutang. Setelah dilakukan pembahasan UJK dengan BPK dan perbaikannya telah diterima oleh BPK. Namun BPK menyarankan untuk melakukan pengurangan penerimaan Kembali dan bebannya di tahun 2024 supaya pada Laporan Operasional 2025 tidak terjadi double nilai pembebanan. Hal ini sudah ditindaklanjuti oleh satker dengan melakukan jurnal manual / koreksi atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pada modul GLP.
- c. Pada pertemuan Tripartid, menurut Kementerian Keuangan karena kondisinya subtansif terkait temuan yang sudah dilunasi di tahun 2025, perlu dilakukan eliminasi penyisihan. Hal ini pun juga sudah ditindaklanjuti dengan melakukan jurnal pada modul GLP.